

INOVASI KEBIJAKAN DESA TANGGUH COVID-19 DI KABUPATEN BANGKA

Bambang Ari Satria

STISIPOL Pahlawan 12

bambang.ari.satria@stisipolp12.ac.id

Sungailiat, 33211, Indonesia

Abstract

Bangka Regency of Bangka Belitung is one of the positively confirmed areas of the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19). However, it is one of the highest cure rate areas in Indonesia dealing with COVID-19 positive patients. This study focused on discussing how the COVID-19 resilient village policy innovation in Bangka Regency looked at three aspects that became a reference in analyzing policy innovations, namely: process aspects, method and product. This study used qualitative research method and described it descriptively-analytically. Data were collected by using in-depth interviews, observation and documentation techniques. The results showed that the innovative COVID-19 village policy in Bangka Regency was well implemented. Several factors that influenced the good implementation of COVID-19 resilient village policy innovations namely from the aspect of the process, work processes internally and externally that went well either with the certificate of village volunteers in fighting COVID-19 or not. The aspect of the method, a village gate guarded post that has been built for 24 hours to record and mobilize residents and guests. The product aspect, there was a COVID-19 resilient village program supported by village funds to explore the potential of the community so that they were empowered and able to play an optimal role for COVID-19 control.

Keywords: COVID-19 ; Innovation; Public Policy; Strong Village

Abstrak

Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah terkonfirmasi positif kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Namun, tingkat kesembuhan pasien positif COVID-19 di daerah tersebut termasuk salah satu tertinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana inovasi kebijakan desa tangguh COVID-19 di Kabupaten Bangka dengan melihat tiga aspek yang menjadi acuan dalam menganalisis inovasi kebijakan yaitu: aspek proses, aspek metode dan aspek produk. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif serta menggambarannya secara deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan desa tangguh COVID-19 di Kabupaten Bangka terlaksana dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi terlaksananya dengan baik inovasi kebijakan desa tangguh COVID-19 tersebut yakni dari aspek proses, proses kerja secara internal dan eksternal berjalan dengan baik dengan adanya surat keputusan relawan desa lawan COVID-19. Dari aspek metode, sudah terbangun pos jaga gerbang desa 24 jam untuk mendata dan memobilisasi warga serta tamu keluar masuk desa. Dari aspek produk, adanya program desa tangguh COVID-19 yang didukung dana desa untuk menggali potensi yang dimiliki masyarakat agar berdaya dan mampu berperan secara optimal untuk pengendalian COVID-19.

Kata Kunci: COVID-19; Desa Tangguh; Inovasi; Kebijakan Publik

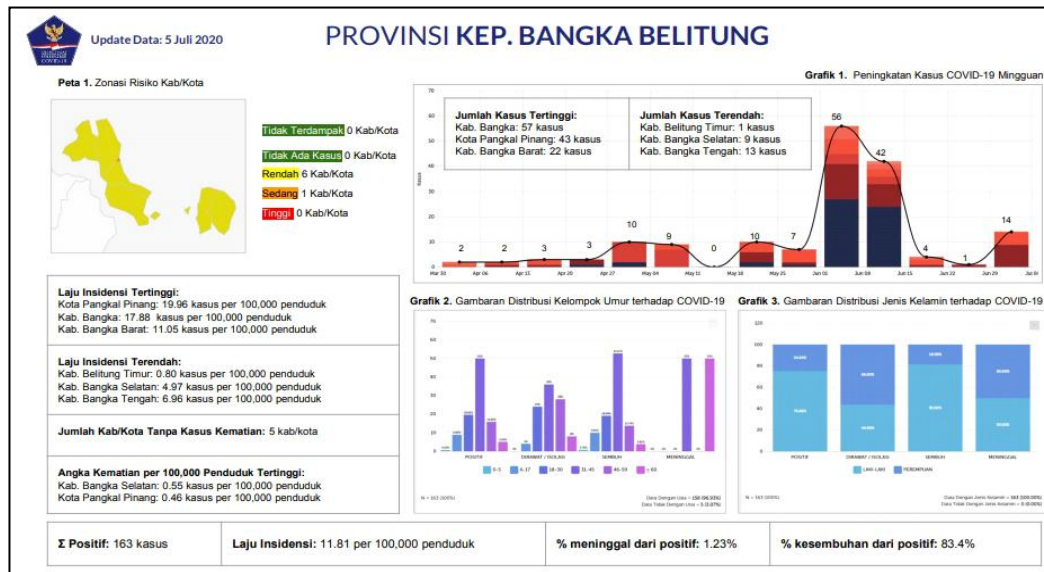
Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Tidak ada yang menyangka bahwa Tahun 2020 adalah tahun yang begitu sulit bagi sebagian dunia. Itu semua karena pandemi yang menerjang sehingga membuat perencanaan-perencanaan yang telah dilakukan sejak awal banyak meleset dan berantakan tak sesuai harapan. Semua rencana itu kandas sebelum dimulai pelaksanaan. Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization (WHO)* atau Organisasi Kesehatan Dunia menyampaikan pesan kepada khalayak, bahwa dunia sedang dilanda virus pandemi Corona yang diberi nama *Corona Virus Disease 2019* atau lebih populer dengan istilah COVID-19. Hanya dalam waktu yang begitu singkat, kasus COVID-19 yang pertama terjadi di Wuhan, China kemudian menyerempet datang dan menghantam 215 negara lainnya termasuk beberapa negara Asia mulai dari Korea, Singapura, Jepang, Malaysia dan juga Indonesia. Peran pengetahuan sangat sentral dalam tata kelola kebijakan penanganan COVID-19 (Amalinda dalam Mas'udi, 2020).

Benteng pertahanan Indonesia tak mampu menahan dan menangkal virus tersebut. Sejak diumumkan adanya kasus pertama COVID-19 oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, COVID-19 kemudian menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Data yang dirilis oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, bahwa perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sudah berada pada angka 68.079 kasus terkonfirmasi positif. Angka tersebut tercatat pada website covid19.go.id yang diupdate pada tanggal 08 Juli 2020. Sementara, kasus pertama COVID-19 yang tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi di Kabupaten Belitung pada tanggal 30 Maret 2020 dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Provinsi ke-31 di Indonesia dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Berdasarkan data yang dirilis Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 05 Juli 2020, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 163 orang. Untuk data lebih lengkap, dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Data COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020

Berdasarkan data pada gambar.1 yang dirilis Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diupdate pada Minggu 05 Juli 2020 Pukul 17.30 WIB, angka kuantitatif terkonfirmasi COVID-19 adalah 163 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 1.123 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 138 orang dan Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 3.298 orang. Untuk kasus tertinggi, berada di Kabupaten Bangka dengan 57 kasus dan kasus terendah berada di Kabupaten Belitung Timur, yakni hanya 1 kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

Yang menarik adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang memiliki tingkat kesembuhan dari infeksi COVID-19 di atas 80%. Formula yang dilakukan adalah kebersamaan dan koordinasi yang baik dalam mengingatkan masyarakat agar patuh terhadap protokol COVID-19 (Kompas, 2020). Adapun tingkat kesembuhan dari kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang diupdate pada tanggal 05 Juli 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk dalam kategori baik, yakni 83,4 persen. Ini menandai bahwa penanganan COVID-19 dinilai efektif. Bahkan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh peringkat 2 terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19 setelah Yogyakarta. Yang dilakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menangani COVID-19 adalah melalui konsep kerja bersama, semua lini bekerja secara sinergi. Konsep kerja bersama dan bekerja secara sinergi dengan melibatkan berbagai aktor, mulai dari tim gugus tugas, aparat pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan komponen masyarakat yang terlibat dalam relawan penanganan COVID-19. Adapun sebaran data COVID-19 per kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada gambar. 2

Gambar 2. Data COVID-19 per Kecamatan di Kabupaten Bangka



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2020

Berdasarkan gambar 2. yang dirilis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang diupdate pada Rabu 08 Juli 2020 Pukul 17.30 WIB mengenai sebaran data COVID-19 per kecamatan di Kabupaten Bangka, dapat dilihat bahwa, pasien terkonfirmasi positif paling banyak ada di Kecamatan Pemali, yakni sebanyak 26 orang. Data diatas juga menunjukkan bahwa hanya 2 kecamatan yang belum terpapar kasus COVID-19 di Kabupaten Bangka, yakni Kecamatan Bakam dan Kecamatan Riau Silip.

Kebijakan publik dibuat oleh pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Masalah tersebut berupa masalah sosial, ekonomi, dan sektor lain yang perlu perhatian dan penyelesaian (Amirudin, 2017). Pemerintahan Desa merupakan bagian dari sub sistem pemerintahan daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dalam hal menghadapi pandemi COVID-19 di daerah selain menjadi tanggung jawab kepala daerah, seharusnya kepala desa mengambil peran dan tanggung jawab yang sama dalam hal menghadapi COVID-19 di lingkup wilayahnya (Kemendagri, 2020). disisi lain Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang berada di level pelaksana kebijakan dan pengawas kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. (Elwan, M., & Ode, L. 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Bukit Layang, Kabupaten Bangka yang menjadi lokus penelitian ini memiliki arah kebijakan pengembangan pembangunan desa dengan meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa, mewujudkan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa.

Sebelum suatu inovasi muncul, idealnya terdapat serangkaian proses yang harus dilalui oleh desa, seperti pemetaan potensi desa, *focus group discussion*, menggelar *workshop* hingga memanfaatkan jejaring yang berpotensi membantu dalam mencapai tujuan (Imron, 2020). Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kaitannya dengan upaya mewujudkan desa tangguh COVID-19, maka arah kebijakan pembangunan Desa Bukit Layang adalah peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik, pengembangan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan desa, dan kerjasama antar desa, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: sarana air bersih skala desa, sanitasi, posyandu, dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa, pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Inovasi kebijakan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat diterapkan dalam berbagai kebijakan seperti pendidikan, sosial dan keuangan (Sururi, 2018). Jenis Inovasi kebijakan publik secara empirik terdapat ke dalam beberapa jenis, yaitu jenis a) inovasi proses terdiri dari Standar Operasional Prosedur (SOP), tata laksana, sistem dan prosedur, b) inovasi metode, terdiri dari strategi, cara dan teknik baru, dan c) jenis inovasi produk (Sururi dalam Anggara, dkk 2020). Adapun signifikansi dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi kebijakan desa tangguh COVID-19 di Kabupaten Bangka dan belum ada penelitian-penelitian yang relevan yang membahas inovasi kebijakan desa tangguh di tengah pandemi COVID-19.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian yang fokus membahas bagaimana inovasi kebijakan desa tangguh COVID-19 di Kabupaten Bangka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data yang berasal dari wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.

Penelitian ini dilaksanakan dalam bulan April hingga bulan Juli 2020 di Kabupaten Bangka, tepatnya di Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam. Alasan pemilihan lokus penelitian ini adalah Desa Bukit Layang yang terletak di Kecamatan Bakam merupakan desa yang berdekatan dengan desa-desa yang berada pada kecamatan yang kasus

terkonfirmasi positif COVID-19 terbanyak dibandingkan dengan daerah lain. Desa Bukit Layang mampu mencegah penyebaran COVID-19 sehingga tidak ada kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di desa tersebut. Alasan lainnya adalah Desa Bukit Layang bukan saja menjalankan aktivitas pencegahan dan penanganan COVID-19, melainkan ada inovasi-inovasi dan produktivitas yang melibatkan masyarakat yang dilakukan dalam kaitannya mencegah COVID-19 di desa tersebut.

Informan penelitian ini adalah masyarakat yang tergabung dalam relawan desa Bukit Layang Lawan COVID-19 yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), Perangkat Desa, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tangga (RT), Pendamping Lokal Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Babinkamtibmas, dan Babinsa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan dari data yang ada agar diperoleh informasi dan data yang cukup bagi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi merupakan sebuah ide baru baik yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat secara umum dimana ide-ide tersebut dapat dilihat. Administrasi publik mensyaratkan inovasi kebijakan melalui terciptanya pengetahuan-pengetahuan baru dalam bentuk inovasi pelayanan terhadap kepentingan publik. Disinilah titik tekan pentingnya kemampuan inovator dalam menerapkan kemampuan administrator dan skill berbasis teknikal. Dalam perspektif administrasi publik, inovasi kebijakan tidak hanya terfokus pada aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan akan tetapi juga terletak pada kemampuan inovator dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sebuah inovasi kebijakan (Sururi, 2017). Perumusan dilaksanakan untuk mengetahui seberapa jauh suatu produk kebijakan dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target yang ditentukan. Inovasi kebijakan publik yang dibahas adalah inovasi kebijakan desa tangguh COVID-19 di Kabupaten Bangka.

Untuk melihat inovasi kebijakan desa tangguh COVID-19 di Kabupaten Bangka dilakukan dalam beberapa aspek sesuai dengan model inovasi kebijakan publik secara empirik. Aspek yang dilakukan dalam penelitian meliputi aspek inovasi proses, yang memberikan informasi mengenai tata laksana, sistem dan prosedur. Aspek inovasi metode, memberikan informasi mengenai strategi dan cara yang digunakan. Dan aspek inovasi produk, yang memberikan informasi mengenai produk yang dihasilkan.

Inovasi Kebijakan Berdasarkan Proses

Penerapan inovasi kebijakan berdasarkan proses lebih menekankan pada peningkatan kualitas proses kerja secara internal dan eksternal, dari berbagai stakeholder yang dilakukan secara efisien dan efektif (Anggara, dkk, 2020). Dimana yang dimaksud

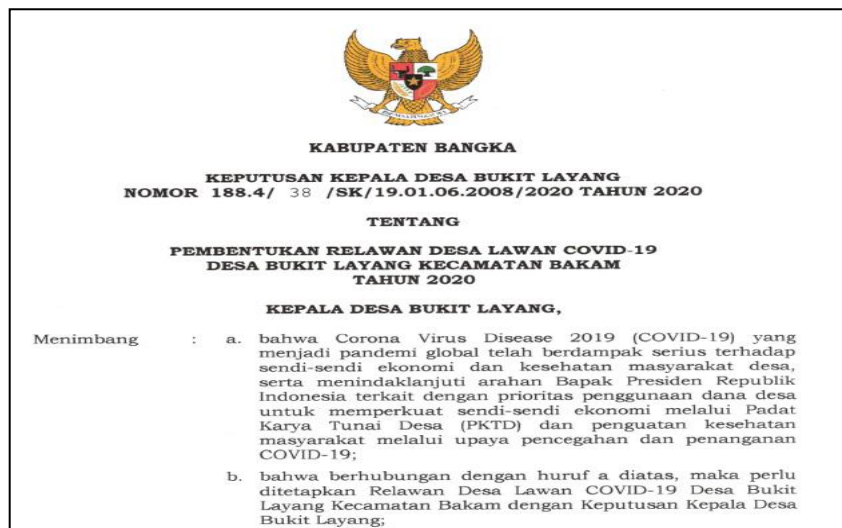
dengan inovasi kebijakan berdasarkan proses secara internal berkaitan dengan pembenahan dalam ruang lingkup organisasi. Sedangkan, inovasi secara eksternal berkaitan dengan pembenahan proses kerja yang berkaitan dengan pihak luar (pelanggan dan pemangku kepentingan) dalam rangka memberikan pelayanan publik. Mekanisme kerja organisasi publik yang cenderung lambat, berbelit-belit dan rumit dirubah ke arah mekanisme kerja yang cepat, tepat dan produktif (Sururi, 2016).

Beberapa ruang lingkup dari inovasi proses antara lain Standar Operasional Prosedur (SOP) tata laksana, sistem dan prosedur. Kriteria penentu adalah sebagai berikut:

1. Inovasi ini dilangsungkan pada level tata laksana rutin.
2. Inovasi disebut sukses apabila proses kerja yang dilakukan menjadi semakin cepat, mudah, dan efektif.
3. Dalam tata laksana rutin, pihak yang berwenang menjadi semakin sedikit dan duplikasi atau tumpang tindih tahapan menjadi hilang.

Bagi organisasi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, indikator kesuksesan adalah peningkatan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, yang dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Gambar 3. Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Layang tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19.



Sumber: data diolah peneliti, 2020

Berdasarkan gambar 3. Desa Bukit Layang melalui Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Layang Nomor 188.4/38/SK/19.01.06.2008/2020 telah membentuk relawan desa untuk lawan COVID-19. Dimana Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.

2. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dimana masyarakat dihimbau untuk cuci tangan pakai sabun ketika hendak keluar dan sampai dirumah.
3. Menghimbau dan memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
4. Menyediakan informasi penting terkait penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulance, dan lain-lain.
5. Merekomendasikan kepada warga yang pulang daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.
6. Memantau masyarakat yang menunjukkan gejala terjangkitnya COVID-19 dengan berkoordinasi dengan pusat layanan kesehatan setempat.
7. Memantau masyarakat yang datang dari pulau Bangka terutama yang datang dari daerah yang sudah terjangkitnya COVID-19 dengan berkoordinasi dengan pusat layanan kesehatan setempat.
8. Melakukan penyemprotan disinfektan ke fasilitas umum desa dan fasilitas Pemerintahan Desa (tempat ibadah, pasar desa, sekolah, dan lain lain).
9. Menyediakan dan melakukan kegiatan cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* disetiap fasilitas umum dan fasilitas pelayanan Pemerintahan Desa.
10. Segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka terkait tersedianya sarana dan prasarana kesehatan (masker, *hand sanitizer*, disinfektan, petugas, dan lain-lain) guna pencegahan dan kesiapsiagaan COVID-19.

Kebijakan itu dikeluarkan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini kepala desa untuk mengatasi masalah yang dihadapi, yakni pandemi COVID-19. Dalam hal ini kebijakan dipandang sebagai sebuah siklus yang dimungkinkan akan terjadi inovasi kebijakan. Kebijakan publik harus juga dikembangkan sebagai alat untuk mengedepankan perubahan-perubahan di sektor publik, sehingga pergerakan reformasi di sektor publik dapat bergerak lebih cepat dari yang diusahakan oleh kebijakan publik sebelumnya (Indiahono, 2017). Selain mengeluarkan kebijakan melalui surat keputusan kepala desa, Pemerintahan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam juga mengikuti Program Pemerintah Pusat berupa menyalurkan bantuan sosial berupa uang dan sembako bagi masyarakat yang terdampak COVID-19.

Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah kebijakan tertentu dirumuskan, diadopsi, lalu diimplementasikan, akan memunculkan umpan balik dan seterusnya (B. Rusli, 2000 dalam Tahir 2014).

Inovasi Kebijakan Berdasarkan Metode

Penerapan Inovasi metode dilakukan berdasarkan model dan strategi kebijakan yang baru. perubahan metode lama ke arah metode yang baru dimaksudkan agar dapat dicapai tujuan yang lebih optimal (Sururi, 2016). Apabila metode baru yang lebih baik ditemukan, maka penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan dapat dilakukan secara lebih berhasil dan tepat guna. Menurut LAN (2016) Kriteria penentuan berdasarkan metode dilakukan sebagai berikut :

1. Bentuk dari inovasi ini adalah kebijakan organisasi yang menggariskan cara baru dalam melakukan proses kerja organisasi. Cara baru ini dapat menyasar berbagai ranah seperti cara membuat keputusan, cara membuat produk, cara melakukan pelayanan, dan sebagainya.
2. Inovasi ini dilakukan ketika cara atau metode lama yang digunakan organisasi dirasa tidak lagi efektif dan menguntungkan.
3. Mengingat inovasi ini bersifat makro dan dapat diterapkan untuk bidang yang luas, untuk membedakannya dari inovasi yang lain, maka perlu dicari inovasi metode yang sifatnya holistik dan paradigmatis. Metode yang baru tersebut diterapkan untuk seluruh kegiatan dan sektor yang ada di organisasi tersebut.

Adapun inovasi kebijakan berdasarkan metode yang dilakukan oleh Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam adalah dengan mendirikan pos jaga gerbang desa 24 jam. Pos jaga tersebut diintegrasikan dengan posko gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 Desa Bukit Layang.

Aktifitas posko gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19, relawan desa melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan Bakam bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Desa Bukit Layang dalam upaya penanganan COVID-19. Stakeholder yang dilibatkan dalam relawan desa lawan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Desa Bukit Layang dengan anggota Perangkat Desa, BPD, Bidan Desa, PKK, BUMDes, Kepala Dusun, RT, dan lainnya. Koordinasi dilakukan dari tingkat terendah sampai tertinggi. Koordinasi diperlukan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan yang telah dibuat.

Relawan COVID-19 Desa Bukit Layang bekerja sama dalam proses pemantauan bagi masyarakat desa Bukit Layang yang dikategorikan Orang Dalam Pengawasan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG). Selain itu Pemerintahan Desa Bukit Layang menerapkan sistem tamu wajib lapor bagi warga luar yang berkunjung agar penyebaran COVID-19 bisa diatasi. Pemerintah Desa Bukit Layang juga menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah pusat seperti cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*, memakai masker, dan menjaga jarak agar penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir.

Metode pos jaga gerbang desa 24 jam ini dinilai berhasil untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 masuk ke desa dikarenakan mobilisasi warga desa dan tamu yang datang ke desa di data dan di periksa, mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga desa yang keluar masuk desa, merekomendasikan warga desa dari luar desa atau luar daerah untuk melakukan isolasi yang ditempatkan di balai desa yang disiapkan pihak desa sebagai tempat isolasi, dan merekomendasikan warga yang kurang sehat untuk ditempatkan di ruang isolasi yang disediakan pihak desa.

Inovasi Kebijakan Berdasarkan Produk

Produk adalah keluaran yang dihasilkan dari sebuah proses kerja dalam suatu organisasi. Produk dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni fisik (barang) dan non-fisik atau imaterial (jasa). Produk yang dihasilkan organisasi memiliki daya saing. Menurut LAN (2016), kriteria penentuan inovasi produk adalah :

1. Inovasi ini dipakai atau dinikmati secara langsung oleh pelanggan.
2. Organisasi terlibat secara langsung, aktif, dan penuh melalui proses internalnya untuk menghasilkan keluaran yang dinikmati pelanggan tersebut.

Inovasi produk disebut sukses apabila: produk yang dihasilkan semakin bermutu dan meningkat kualitasnya sehingga pemakai semakin puas; atau produk yang diciptakan merupakan produk baru yang tidak ada pesedennya. Kebaruan tersebut memenuhi harapan dan keinginan pelanggan dalam cara yang sebelumnya tak terbayangkan.

Gambar 4. Pembuatan masker untuk masyarakat Desa Bukit Layang



Sumber: data diolah peneliti, 2020

Berdasarkan gambar 4. pelaksanaan kebijakan berbasis produk yang dilakukan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam berupa produksi masker dan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat Desa Bukit Layang, dimana pemerintah desa Bukit Layang bekerja sama dengan Tim penggerak PKK membuat masker untuk masyarakat Desa Bukit Layang yang kemudian hasilnya dijual kepada pemerintah desa Bukit Layang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Layang untuk dibagikan kepada masyarakat Desa Bukit Layang. Selain itu, Desa Bukit Layang juga membagikan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19.

Inovasi produk lainnya yang dihasilkan Desa Bukit Layang sebagai desa tangguh COVID-19 adalah dengan melibatkan masyarakat setempat untuk tetap menjaga ketahanan pangan warga. Inovasi produk tersebut dapat dilihat pada gambar 5. berikut ini :

Gambar 5. Ketahanan Pangan untuk masyarakat Desa Bukit Layang



Sumber: data diolah peneliti, 2020

Berdasarkan pada gambar 5. terlihat bahwa masyarakat Desa Bukit Layang, Kabupaten Bangka secara bergotong royong memanfaatkan lahan desa untuk ketahanan pangan warga. Kemandirian desa yang dibangun masyarakat Desa Bukit Layang dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat juga bagian dari penanganan dan pencegahan COVID-19. Selain itu, masyarakat di Desa Bukit Layang juga memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing warga untuk menanam sayur-sayuran yang bisa dipanen secara cepat seperti cabe, tomat, bayam dan kangkung. Inovasi yang dilakukan masyarakat Bukit Layang dengan memanfaatkan pekarangan merupakan solusi pangan di masa pandemi.

KESIMPULAN

Penerapan inovasi di tengah pandemi dirasa penting sebagai jalan keluar untuk memaksimalkan penanggulangan COVID-19. Desa Tangguh COVID-19 merupakan sebuah inovasi yang diinisiasi oleh Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka.

Berdasarkan hasil pembahasan tentang inovasi kebijakan desa tangguh COVID-19 di Kabupaten Bangka, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan inovasi desa tangguh COVID-19 di Kabupaten Bangka terlaksana dengan baik. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam pelaksanaan inovasi desa tangguh COVID-19. Masyarakat sangat mendukung adanya penerapan inovasi-inovasi yang dilakukan di level lokal desa dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19, apalagi inovasi yang dilakukan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga menghasilkan produk-produk yang dapat dimanfaatkan. Dukungan masyarakat terhadap penerapan inovasi-inovasi tersebut terwujud setelah masyarakat mengetahui akan dampak dari inovasi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, Ahmad. (2017) "Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata Di Kota Batu" *Journal of Public Sector Innovations*, 2(1): 26-32.
- Anggara, S, dkk (2020). Inovasi Kebijakan Publik Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Di Jawa Barat. *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*
- Elwan, M., & Ode, L. (2018). Rekomendasi Kebijakan Program Kota Layak Anak di Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 2(1), 15-29.
- Imron, Muhammad. (2020) "Kolaborasi *Quadruple Helix* Dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas Di Desa Palaan" *Journal of Public Sector Innovations*, 4(2): 68-74
- Indiahono, Dwiyanto. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta
- Kementerian Dalam Negeri (2020). *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*. Jakarta: Tim Kerja Kemendagri
- Kompas (2020). <https://regional.kompas.com/read/2020/06/23/16494251/angka-kesembuhan-pasien-covid-19-di-babel-mencapai-80-persen> di akses pada tanggal 30 Juni 2020 jam 17.05 WIB
- LAN. (2016). *Pengembangan Model dan Story Administrasi Negara*, Pusat Intan-Dian-LAN, Jakarta
- Mas'udi, Wawan dkk (2020). *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Layang Nomor 188.4/38/SK/19.01.06.2008/2020 tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Tahun 2020
- Sururi, Ahmad. (2016) "Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris)" *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 4(3): 1-14
- (2017) "Inovasi Kebijakan Dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance" *Journal Spirit Publik*, 12(2): 14-31
- (2018) "Inovasi Kebijakan Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Pariwisata (Studi Pada Kawasan Ekowisata Situterate Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang)" *Jurnal Administrative Reform*, 6(3): 110-12
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.